



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andap Budhi Revianto  
Jabatan : PIt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
PIt. Sekretaris Jenderal

Andap Budhi Revianto

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 30.442.943.000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 30.238.044.000,-

Pihak Kedua,  
Pjt. Sekretaris Jenderal



Andap Budhi Revianto

Jakarta, Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

  
Cahyo Rahadian Muzhar  
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

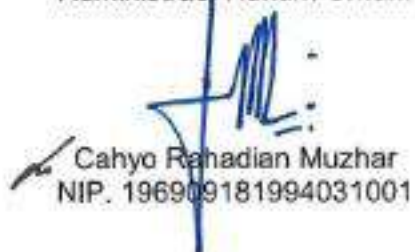
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
3.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.991.122.000,-</b>
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 3.902.750.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 1.088.372.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.183.714.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 6.183.714.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 11.174.836.000,-</b>

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum



Cahyo Rahadian Muzhar  
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	70

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
8.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
9.		1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	1
		3. Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	1

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 122.191.580.000,-</b>
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 122.191.580.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 345.519.562.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 345.519.562.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Masyarakat



Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jhoni Ginting

Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi

Jhoni Ginting  
NIP. 196106121989031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 16.584.614.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.584.614.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 46.015.888.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 46.015.888.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi



Jhoni Ginting  
NIP. 196106121989031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi

NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	600 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.080.189.000,-</b>
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.080.189.000,-

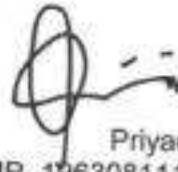
Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

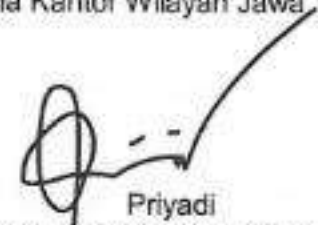
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

  
Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 272.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 272.000.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan



Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi

NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

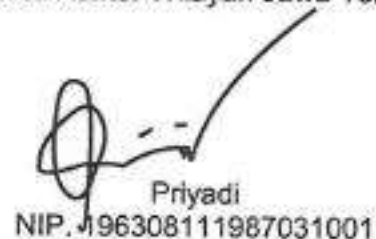
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

  
Mualimin Abdi  
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	35%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 313.738.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 313.738.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi  
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Benny Riyanto  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 121.147.000,-</b>
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 121.147.000,-
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 5.988.233.000,-</b>
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 5.988.233.000,-

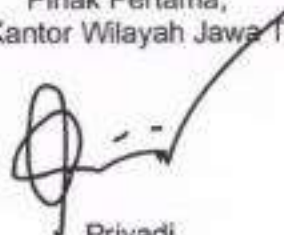
Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

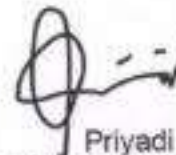
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 04 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Hukum dan HAM

Sri Puguh Budi Utami  
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Priyadi  
NIP. 196308111987031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku



Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 197.997.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 197.997.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan HAM



Sri Puguh Budi Utami  
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi  
NIP. 196308111987031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priyadi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Priyadi

NIP. 196308111987031001